



## TANTANGAN BONUS DEMOGRAFI BAGI PEMERINTAH

Dian Irma Aprianti<sup>1\*</sup>

Suyanto<sup>2</sup>

Sugeng Choirudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

### ABSTRAK

*Indonesia beberapa tahun kedepan, tepatnya tahun 2030 -2040 akan melalui satu fase yang disebut dengan bonus demografi. Suatu keadaan dimana usia produktif akan berlimpah melebihi usia non produktif. Indonesia akan mengalami beban demografi ketika porsi penduduk usia kerja menurun, dan akan menjadi masalah potensial. Periode ketika bonus demografi berakhir dan menurunnya proporsi penduduk usia kerja yang menyebabkan masalah ekonomi disebut tanggung jawab demografis atau beban demografi. Jepang adalah contoh nyata dari negara yang mengalami masalah ini dan sebagian besar Negara-negara Eropa akan mengalami masalah ini di tahun-tahun mendatang. Satu hal yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah percepatan penanaman modal asing dan dalam negeri, khususnya pada industri padat karya.*

**Kata Kunci :** Bonus Demografi, Pendidikan, Ketahanan pangan, Kesehatan, Pengangguran

\*Korespondensi:  
Dian Irma Aprianti  
E-mail:  
dianirma@uwgm.ac.id

### Pendahuluan

Setiap tahunnya jumlah penduduk dunia terus bertambah. Kenaikan jumlah penduduk tertinggi biasanya terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, serta pekerjaan. Beberapa tahun ke depan Indonesia akan menghadapi lonjakan usia produktif atau yang dikenal dengan bonus demografi tepatnya tahun 2030-2040. Bonus demografi adalah fenomena dimana pada kurun waktu tersebut kondisi masyarakat Indonesia akan didominasi oleh usia produktif (usia 15-64 tahun) dibandingkan usia non produktif. BPS memperkirakan jika setidaknya sekitar 64% usia produktif dari total penduduk yang diproyeksikan yakni 297 juta jiwa.

Bonus demografi hanya terjadi satu kali di setiap negara. Sampai saat ini ada banyak negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Salah satu manfaat bonus demografi adalah mampu merubah perekonomian negara dari negara berkembang menjadi negara maju.

Hal ini bisa dikatakan bahwa Indonesia memiliki keuntungan besar, jika dibandingkan dengan negara Jepang yang dimasa depan penduduknya lebih banyak yang berusia tua.

Sehingga Indonesia memiliki tingkat produktivitas yang seharusnya lebih baik daripada Jepang. Momen yang cukup jarang terjadi ini tentu akan memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara. Namun, perlu dicermati bahkan harus diperhatikan bahwa keadaan tersebut tidak selalu menguntungkan, terutama jika jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang justru dapat menjadi ancaman bagi negara.

Namun perlu diperhatikan sejalan dengan bonus demografi ini yaitu kuantitas yang meningkat dan harus berjalan seimbang dengan kualitas kompetensi individu masyarakat Indonesia khususnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka semua pihak terlibat di dalamnya seperti pemerintah melalui regulasi pendidikan dan sektor swasta dalam menyiapkan lapangan pekerjaan karena sumber daya manusia yang berlimpah justru menambah angka pengangguran sehingga menimbulkan permasalahan sosial tersendiri.

Satu hal yang harus kita cermati bersama yaitu dengan bonus demografi berarti sejalan dengan dibutuhkannya lapangan pekerjaan yang banyak pula, seiring dengan revolusi 5.0 maka ini adalah PR yang tidak mudah bagi kita dimana fungsi manusia akan digantikan dengan robot.

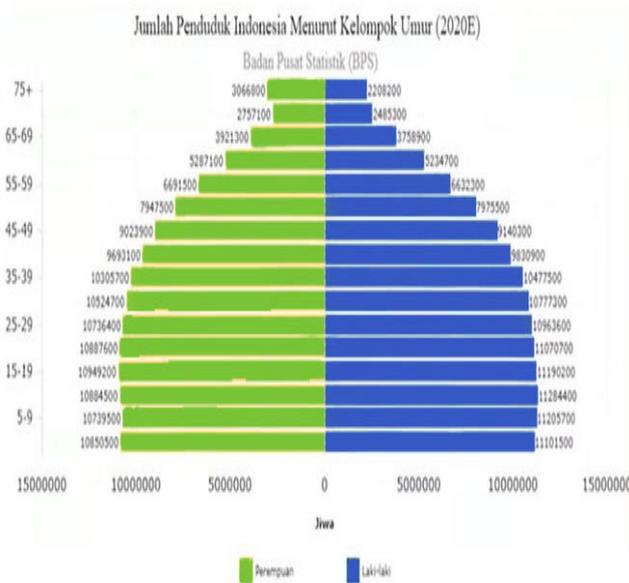
Menilik negara Jepang yang saat ini pertumbuhan penduduknya mengalami penyusutan sampai 1% setiap tahunnya namun uniknya pertumbuhan ekonomi Jepang justru mengagumkan. Pertumbuhan ekonomi Jepang per pekerja sekitar 2% jauh lebih tinggi dari AS dan Uni Eropa. Walaupun ekonomi AS tumbuh lebih dari 35% sejak tahun 2000, penduduk usia kerjanya juga meningkat signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi AS per pekerja hanya sekitar 1%.

Mengingat Jepang adalah suatu bangsa yang mengalami tingkat penuaan penduduk yang sangat tinggi, kinerja perekonomian yang dihasilkannya sangat mencengangkan. Kunci sukses Jepang adalah mendorong penduduk usia kerja untuk bekerja optimal dan semakin produktif, sehingga tingkat penganggurannya paling rendah di antara negara maju, yaitu kurang dari 3%, dan hampir dari 80% penduduk usia kerja terserap oleh sector produktif, dibandingkan dengan Uni Eropa dan AS yang hanya sekitar 70% (Winarno 2017).

Prestasi Jepang dalam capaian tenaga kerja penuh dan pertumbuhan tinggi penyerapan tenaga kerja selama dua dekade terakhir menjadi catatan penting menarik bagi ekonom, di tengah-tengah deflasi yang permanen selama periode tersebut (harga-harga secara umum saat ini di Jepang lebih rendah dari harga-harga 15-20 tahun yang lalu).

Berbeda dengan Jepang, Uni Eropa, AS dan negara maju lainnya, Indonesia diuntungkan dari aspek demografi, yaitu kita ditakdirkan memasuki periode bonus demografi. Tidak banyak negara yang memiliki kemewahan seperti itu. Apalagi negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Bahkan, Negara *emerging* seperti Tiongkok telah memasuki masa penuaan karena kebijakn *one child policy* masa lalunya; Rusia juga memasuki babak yang sama karena secara umum masyarakat Rusia tidak suka punya anak, bagi mereka punya anak adalah beban. Hanya tinggal India dan Pakistan (negara dengan penduduk besar) yang posisi demografinya hampir sama dengan kita.

Bonus demografi yang kita miliki adalah per tiga (3) orang penduduk, dua (2) penduduk kita adalah penduduk produktif. Kebalikan dengan Jepang, per tiga (3) orang penduduk hanya satu (1) orang yang produktif. Jadi di Jepang satu orang menopang dua orang, sedangkan di negara kita, dua orang menyangga satu orang. Idealnya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia harusnya lebih tinggi dari Jepang.



**Gambar 1: Bonus Demografi Indonesia**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Jika dilihat grafik di bawah ini menunjukkan angka pertumbuhan populasi masyarakat Jepang yang mengalami penurunan sebesar 0.14 % dari tahun 2020 ke tahun 2021. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan Analisa pada “Dampak Bonus Demografi terhadap Pemerintah” studi kasus Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Topik penulisan ini adalah keadaan demografi Indonesia pada tahun 2030 – 2040 dimana akan terjadi lonjakan usia produktif sehingga hal tersebut tentu saja berdampak dengan bagaimana pemerintah mengatasi bonus demografi?

**Tinjauan Literatur**

**Teori Generasi**

Sejak munculnya Teori Generasi (*Generation Theory*) oleh Karl Mannheim, kita diperkenalkan istilah generasi X, Y, dan Z. Segala sesuatu terutama yang berhubungan dengan pekerjaan sering dikaitkan dengan ciri-ciri dari generasi-generasi tersebut. Hal itu diungkapkan tiada lain untuk mencari jalan tengah agar antar generasi tersebut dapat saling memahami dan mengerti. Selain itu, kita juga menjadi tahu bahwa generasi manakah yang mendominasi di abad ini. Istilah generasi sendiri adalah kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki kesamaan dalam rentang usia, dan mengalami peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama”.

Menurut Mannheim (1991) generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Lebih lanjut Mannheim (1991) menjelaskan bahwa individu yang menjadi bagian dari satu generasi, adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dan berada dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama. Definisi tersebut secara spesifik juga dikembangkan oleh Ryder (1965) yang mengatakan bahwa generasi adalah agregat dari sekelompok individu yang mengalami peristiwa – peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.

## **Tenaga Kerja**

Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Menurut Alam (2014) tenaga kerja adalah penduduk dengan usia antara 17 tahun sampai 60 tahun yang bekerja untuk menghasilkan uang sendiri. Menurut Hamzah (2014), tenaga kerja adalah tenaga yang bekerja didalam maupun luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi baik fisik maupun pikiran.

## **Bonus Demografi**

Bonus demografi merupakan salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk menurut umur. Fenomena transisi demografi ini terjadi karena karena berkurangnya angka kelahiran yang dibarengi oleh tingginya angka kematian dalam jangka panjang. Pada saat terjadi penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang, akan berdampak pada pengurangan jumlah penduduk berusia muda (< 15 tahun), akan tetapi di satu sisi jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) akan meningkat secara drastis sebagai akibat angka kelahiran yang tinggi di masa lalu. Disisi lain jumlah penduduk dengan umur di atas 64 tahun akan meningkat secara perlahan dan kemudian meningkat cepat akibat terjadinya peningkatan usia harapan hidup.

Pada saat jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) ini lah yang disebut dengan kondisi bonus demografi (Rusli dkk 2015). Parameter yang digunakan dalam menilai fenomena bonus demografi adalah *dependency ratio* atau rasio ketergantungan, yaitu merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Angka rasio ketergantungan ini menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Pada saat angka rasio ketergantungan rendah, kondisi ini memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif hanya menanggung sedikit penduduk usia nonproduktif.

## **Data dan Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut McCusker dan Gunaydin (2015) metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang “apa (*what*)”, “bagaimana (*how*)”, atau “mengapa (*why*)” atas suatu fenomena. Sale dkk (2002) menyatakan bahwa penggunaan metode dipengaruhi oleh dan mewakili paradigma yang merefleksikan sudut pandang atas realitas. Lebih lanjut, Kasinath (2013) mengemukakan ada tiga alasan untuk menggunakan metode kualitatif, yaitu (a) pandangan peneliti terhadap fenomena di dunia (*a researcher’s view of the world*), (b) jenis pertanyaan penelitian (*nature of the research question*), dan (c) alasan praktis berhubungan dengan sifat metode kualitatif (*practical reasons associated with the nature of qualitative methods*).

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan

humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan.

### **Pembahasan**

Kalimantan Timur dipercaya sebagai Ibu Kota Negara Indonesia tentu saja ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur terkhusus dalam menghadapi bonus demografi.

Bonus demografi seperti yang telah diuraikan pada latar belakang masalah bahwa setiap kejadian tentu memiliki dampak bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia ini. Pada bonus demografi pemerintah memiliki peran yang porsinya sangat besar mengingat bahwa regulasi yang diciptakan tentu berdampak pada fenomena tersebut.

Bonus demografi tidak hanya membawa berita baik tetapi ada dampak negatif lain yang mengikuti. Dampak positif diantaranya yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Menyediakan tenaga kerja yang produktif
3. Mengatasi persaingan internasional

Namun tentunya ada dampak lain yang harusnya tidak luput dari perhatian pemerintah, diantaranya :

1. Keseimbangan teknologi, lingkungan dan populasi manusia
2. Meningkatnya angka pengangguran
3. Arus Globalisasi yang mengizinkan siapa saja bisa menjadi bagian dari negara manapun dalam hal pencarian kerja
4. Penyebaran Pendidikan

Kesemuanya ini adalah tantangan bagi pemerintah yang harus disiapkan sejak lama.

### **Pendidikan**

Revolusi Industri 4.0 saat ini telah menguasai dunia perindustrian di Indonesia, menghadapi bonus demografi yang akan benar benar terjadi sekitar tahun 2030 – 2040 yang berarti bukan hanya revolusi industri 4.0 yang akan kita lalui tetapi sudah memasuki era revolusi industri 5.0. Jika diamati revolusi industri 5.0 tentu sedikit bertolak belakang dengan bonus demografi dimana pada era 5.0 penggunaan kecerdasan artifisial mendominasi penggantian tenaga manusia terutama di sektor manufaktur.

Tantangan ini terkait dengan bagaimana *Society 5.0* dimaksudkan untuk mengantisipasi era Industri 4.0, dimana peran masyarakat dirasakan masih kurang. *Society 5.0* merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat kepada manusia (*human-centered*) yang berbasis teknologi (*technology based*). Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas, dianggap dapat mendegrasi peran manusia.

Salah satu dampak transformasi digital adalah menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi sangat pesat. Sehingga bisa dinikmati semua orang dengan mudah. Dalam hal ini, *big data* dan *Internet of Things* (IoT) harus menjangkau setiap aspek kehidupan masyarakat, yang akan berubah menjadi kecerdasan buatan. Sehingga untuk memperkuat peran masyarakat dalam menyelesaikan transformasi digital tersebut, masyarakat harus mampu memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat menjadi peluang bisnis.

Sehingga untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan peran seluruh pihak baik dari pemerintahan maupun nonpemerintahan, agar mampu menjawab tantangan bangsa dengan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian *society 5.0* akan mendekati kehidupan kita dengan segala kemudahan teknologi, “era milenial ini memaksa kaum yang tidak produktif untuk dapat mengejar kaum yang produktif dalam segala aspek.

Satu hal yang harus kita tingkatkan pada fase ini adalah bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada generasi milenial melalui bidang Pendidikan. Berpikir kritis merupakan satu-satunya kemampuan yang tidak akan tergantikan oleh robot. Pemikir kritis dapat meningkatkan keterampilan intelektual yang fleksibel, memiliki kemampuan menganalisis informasi, dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah.

Pendidikan yang mengarah kepada karakter building serta pemanfaatan teknologi bisa menjadi salah satu cara dalam mengantisipasi dampak negative dalam bonus demografi di sisi arus teknologi. Karakter building disiapkan sejak anak usia dini untuk menumbuhkan pola pikir kritis. Salah satu cara yang telah ditempuh saat ini adalah adanya kurikulum Kampus Merdeka belajar di mana fokusnya adalah aspek pengembangan kreativitas dan inovasi dalam studi permasalahan.

### **Ketahanan Pangan**

Pada era bonus demografi Indonesia dihadapkan pada permintaan pangan yang makin tinggi karena dipicu laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapat, pergeseran selera konsumsi, konversi lahan, perubahan iklim global, dan konflik kepentingan di beberapa belahan dunia. Pada setiap negara jika usia produktif masyarakatnya tinggi, maka konsumsi akan lebih tinggi, kondisi geografis daratan Indonesia hanya 190 juta hektare namun harus melayani 258 juta masyarakat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pangan, Badan Pangan Nasional merupakan sarana efektif dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. BPN diharapkan menjadi pusat komando dari seluruh koordinasi antarkementerian yang diarahkan menuju kedaulatan pangan.

Ketahanan agrikultur tidak hanya bertujuan melindungi sumber daya alam tetapi juga untuk menunjang terjaminnya kebutuhan pangan saat ini dan akan datang (Setiawan 2019). Ketahanan Pangan terutama agrikultur akan menghadapi banyak isu diantaranya : kurangnya lahan pertanian dan perkebunan. Salah satu program yang pernah dicetuskan oleh pemerintah adalah pemanfaatan lahan gambut pada Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Agrikultur adalah sektor vital di Indonesia, sampai saat ini agrikultur masih menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. pemerintah berupaya untuk mempromosikan dan melindungi ketahanan pangan melalui penetapan harga, *stockholding* publik, jaring pengaman sosial, serta pemerataan gizi.

Untuk saat ini pemerintah bisa mengkolaborasi teknologi dengan penggunaan lahan minimalis untuk pertanian seperti yang dilakukan oleh negara Jepang ketika negara tersebut melakukan revolusi pertanian dimana lahan diubah menjadi pusat teknologi dengan bantuan kecerdasan buatan. Kemampuan agroteknologi untuk meningkatkan ketepatan dalam mengamati dan memelihara tanaman kemungkinan akan berperan penting di masa depan.

### **Kesehatan**

Bonus demografi merupakan kesempatan emas bangsa Indonesia untuk mempercepat pembangunan karena pada periode tersebut struktur penduduk Indonesia didominasi

oleh penduduk usia produktif. Namun, hal tersebut dapat terwujud jika penduduk muda di Indonesia memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika kualitas pemuda Indonesia buruk, alih-alih menjadi bonus demografi, mereka hanya akan menjadi "beban" demografi.

Dalam *The Copenhagen Consensus 2012*, para ekonom tersebut menemukan bahwa cara paling cerdas mengalokasikan uang untuk menghadapi 10 tantangan utama dunia adalah melakukan investasi untuk perbaikan status gizi penduduk. Untuk mencapai tujuan keluarga sehat dan memiliki kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama. Keberhasilan mengimplementasikan pendekatan preventif dan promotif secara tepat akan menyelamatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.

Keberhasilan pembangunan kesehatan akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan dewasa ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalkan periode bonus demografi yang akan datang.

*World Health Organisation (WHO)* mencatat 7,8 juta dari 23 juta balita di Indonesia mengalami *stunting*. WHO juga telah menetapkan batas toleransi *stunting* maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah seluruh balita. Sementara itu angka *stunting* pada balita Indonesia berada pada angka 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen balita dikategorikan sangat pendek dan 17,1 persen dikategorikan pendek. Oleh sebab itu, masalah kesehatan harus dijadikan perhatian serius. Bisa dikatakan jika seseorang telah terkena *stunting* maka mereka kalah sebelum ikut kompetisi.

Pencegahan *stunting* tersebut bisa dilakukan dengan cara diantaranya pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita, melalui puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, kemudian bisa dengan peningkatan kualitas sanitasi karena peningkatan status gizi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin. Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan kita memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya.

Pada dasarnya kesehatan menjadi sektor yang menyumbang perhatian besar mengingat dengan berakhirnya fase bonus demografi maka mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup pada saat itu adalah usia non-produktif maka diharapkan usia non-produktif tersebut adalah generasi yang sehat.

### **Angka Penangguran**

Bonus demografi menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk melakukan berbagai percepatan pembangunan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) berusia produktif yang melimpah. Apalagi, tahun 2030 terdapat agenda besar pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Sejalan dengan itu, pemerintah pun telah mencanangkan visi Indonesia Emas tahun 2045 dengan harapan terciptanya generasi produktif yang berkualitas.

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai penduduk terbanyak di ASEAN, yaitu sekitar 261 juta. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 128,06 juta orang, sebanyak 121,02 juta orang penduduk bekerja dan sebanyak 7,04 juta orang menganggur.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2016 sebesar 5,61%. Dan sebanyak 69,02 juta orang (57,03%) penduduk bekerja di kegiatan informal.

Untuk memanfaatkan bonus demografi, dipandang perlu kebijakan guna mendorong munculnya wirausaha muda, dan memberdayakannya untuk mendukung pembangunan nasional. Bonus demografi tanpa diikuti pendidikan yang merata dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai akan menjadikan ancaman bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini kementerian Pendidikan nasional harus cekatan dalam menempatkan penduduk Indonesia dewasa yang melimpah sebagai kekuatan yang potensial dengan menempatkan program pendidikan nasional sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami kemerosotan di bidang manufaktur, hal ini tentu menjadi perhatian mengingat Indonesia harus segera melakukan revitalisasi di bidang pangsa pasar manufaktur. Tumpuan untuk itu tentu saja disesuaikan dengan kemampuan serta sumber daya yang tersedia atau dalam bahasa lain harus sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, fokus pada sumber daya maritim, pertanian, dan perkebunan dirasa akan mampu menjadikan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif.

Selain itu, angka pengangguran pada bonus demografi bisa diminimalisir dengan cara pemberian pelatihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan industri artinya harus ada keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Satu hal yang turut menyumbang dalam minimalisir angka pengangguran pada saat bonus demografi adalah peningkatan jumlah ekspor dengan mengurangi impor dengan demikian produktivitas akan meningkat serta mampu mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi nasional.

## **Kesimpulan**

Bedasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan fase demografi bukan hanya mengenai bagaimana melimpahnya usia produktif tetapi hal tersebut diiringi dengan manfaat serta dampak yang akan dihadapi Pemerintah Indonesia.

Empat poin yang harus dipersiapkan Indonesia ke depan adalah pendidikan, ketahanan pangan, kesehatan, serta angka pengangguran. Keempat sektor tersebut sangat menentukan sejarah bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia. Peran aktif pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas, kecukupan pangan, kesehatan yang baik, serta pengelolaan jumlah angka pengangguran sangat membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi bonus demografi.

Keberhasilan melalui bonus demografi akan membawa Indonesia menjadi negara maju seperti Negara Singapura, Jepang, serta Korea Selatan. Namun sebaliknya, kegagalan mengelola bonus demografi akan menempatkan Indonesia menjadi negara miskin.

## **Daftar Pustaka**

Alam, S. 2014. *Pengantar Ekonomi Dan Bisnis Jilid 1 Bidang Keahlian Bisnis Dan Manajemen Untuk SMK/MAK Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

- Hamzah, B. 2014. *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasinath, HM. 2013. "Understanding and Using Qualitative Methods in Performance Measurement." *MIER Journal of Educational Studies Trends & Practices* 3(1):46–57.
- Mannheim, Karl. 1991. *Ideologi Dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- McCusker, K., and S. Gunaydin. 2015. "Research Using Qualitative, Quantitative or Mixed Methods and Choice Based on the Research." *Perfusion (United Kingdom)* 30(7):537–542. doi: 10.1177/0267659114559116.
- Rusli, S., Toersilaningsih, R., Meirida, D., Kurniawan, U. K., & Setiawan, K. D. 2015. *Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
- Ryder, N. B. 1965. "The Cohort as a Concept in the Study of Social Change." *American Sociological Review* 30(6):843–861. doi: 10.2307/2090964.
- Sale, M. J., Lohfeld, L. H., & Brazil, K. 2002. Revisiting the quantitative-qualitative debate: Implication for mixed-method research. *Quality and Quantity*, 36(1), 43-53.
- Setiawan, Satria Aji. 2019. "Mengoptimalkan Bonus Demografi Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Analis Kebijakan* 2(2). doi: 10.37145/jak.v2i2.34.
- Winarno, Tri. 2017. "Bonus Demografi Dan Pertumbuhan Ekonomi, Belajar Dari Jepang." *Investor.Id*. Retrieved (<https://investor.id/opinion/168823/bonus-demografi-dan-pertumbuhan-ekonomi-belajar-dari-jepang>).